

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Amiek Soemarmi, 2016. *Buku Ajar Hukum Perikanan*. Semarang: Undip Press
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Djoko Tribawono. 2002. *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Johny Ibrahim. 2011. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Juliansyah Noor. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2013. *Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3-K Provinsi*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan
- L Tri Setyawanta R. 2005. *Buku Ajar Pokok-Pokok Hukum Laut Internasional*. Semarang: Pusat Studi Hukum Laut
- M.S Wibisono. 2005. *Pengantar Ilmu Kelautan*. Yogyakarta: Grasindo
- Marhaeni Ria Siombo. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Mohammad Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Panitia Pengembangan Riset dan Teknologi Kelautan serta Industri Maritim. 1996. *Profil Kelautan Nasional*. Hardi Prasetyo (ed.)
- Rokhmin Dahuri, dkk. 1996. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Roni Hanitjo Soemitro. 1982. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sirajudin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain. 2015. *Legislative Drafting*. Malang: Setara Press

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Supriharyono. 2002. *Pelestarian Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Pesisir Tropis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Sutrisno Hadi. 2000. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi

**Jurnal :**

[Repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/55051/6/BAB%2011%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf](http://Repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/55051/6/BAB%2011%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf)

[media.unpad.ac.id/thesis/230110/2006/230110066001\\_2\\_1006.pdf](http://media.unpad.ac.id/thesis/230110/2006/230110066001_2_1006.pdf)

[jurnal.uns.ac.id/hpe/article/download/17754/14168](http://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/download/17754/14168)

**Website:**

[www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public\\_c/pulau\\_info/296](http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/296)

<https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/artikel%20ananda.pdf>

[https://www.academia.edu/20003814/ZONASI\\_WILAYAH\\_PESISIR\\_DAN\\_PULAU-PULAU-KECIL\\_SEBAGAI\\_SALAH\\_SATU\\_INSTRUMEN\\_PENGELOLAAN\\_PESISIR\\_TERPADU\\_DI\\_DAERAH](https://www.academia.edu/20003814/ZONASI_WILAYAH_PESISIR_DAN_PULAU-PULAU-KECIL_SEBAGAI_SALAH_SATU_INSTRUMEN_PENGELOLAAN_PESISIR_TERPADU_DI_DAERAH)

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2034

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 901 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/KEPMEN-KP/2018 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional

**Wawancara:**

Amelia Indriastuti, *Wawancara*, Staff Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Provinsi Jawa Tengah 4 September 2018